

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai kemandirian empat Pemerintah Kabupaten dan satu Pemerintah Kota di Propinsi D.I.Yogyakarta selama tahun anggaran 2000 s/d 2003 maka dapat disimpulkan bahwa **empat Kabupaten dan satu Kota di Propinsi D.I.Yogyakarta belum mandiri. Kemandirian empat Kabupaten dan satu Kota di Propinsi D.I.Yogyakarta dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat masih relatif rendah.** Ini dapat dilihat dari rasio Derajat Desentralisasi Fiskal empat Kabupaten dan satu Kota di Propinsi D.I.Yogyakarta. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada empat Kabupaten dan satu Kota di Propinsi D.I.Yogyakarta menunjukkan rendahnya proporsi PAD dan BHPBP terhadap TPD, dan tingginya proporsi SD terhadap TPD, yang berarti masih tingginya ketergantungan pada Pemerintah Pusat dalam pembiayaan pengeluaran-pengeluaran Pemerintah Daerah di empat Kabupaten dan satu Kota di Propinsi D.I.Yogyakarta.

Begitu juga pada rasio Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal dari empat Kabupaten dan satu Kota di D.I.Yogyakarta yang menunjukkan

bahwa kebutuhan fiskal dari tahun ke tahun selalu lebih tinggi dari kapasitas fiskal yang ada. Disini setiap tahunnya terjadi kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yang harus ditutup dengan dana transfer dari Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan tingkat kemandirian empat Kabupaten dan satu Kota di propinsi D.I.Yogyakarta masih sangat rendah karena sumbangan dari Pemerintah Pusat masih sangat tinggi bahkan melebihi dari kapasitas yang tersedia.

Rata-rata tingkat kemandirian dari empat Kabupaten dan satu Kota di Propinsi D.I.Yogyakarta selama empat tahun yang dilihat dari rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Kebutuhan Fiskal, dan Kapasitas Fiskal secara lengkap disajikan pada tabel dibawah ini :

Kabupaten/ Kota	Tingkat Kemandirian					Fiscal Gap
	Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)			Kebutuhan Fiskal	Kapasitas Fiskal	
	(PAD)	(BHPBP)	(SD)			
	(TPD)	(TPD)	(TPD)			
Bantul	6,8%	5,11%	78,21%	14,71	3,53	11,18
Gunungkidul	5,14%	4,53%	78,97%	12,86	4,10	8,76
Kulonprogo	6,37%	4,46%	77,82%	21,42	2,69	18,73
Sleman	10,9%	7,19%	75,53%	14,96	5,51	9,45
Yogyakarta	18,69%	10,64%	53,37%	21,44	9,49	11,95

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kemandirian empat Kabupaten dan satu Kota di Propinsi D.I.Yogyakarta masih sangat rendah, maka penulis mencoba memberikan saran-saran :

1. Pemerintah Daerah sebaiknya menggali sumber-sumber keuangan yang berpotensi yaitu dengan melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah.
 - a. Upaya intensifikasi berupa pengelolaan penerimaan daerah secara profesional sesuai dengan prosedur yang baik dan transparan guna menghindari pemborosan biaya dan kebocoran penerimaan daerah.
 - b. Upaya ekstensifikasi dapat dilakukan dengan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru, yaitu dengan meningkatkan pungutan melalui investasi. Untuk mendukung hal tersebut, maka upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah :
 - i. Menciptakan daya tarik dan iklim yang kondusif bagi investor lokal maupun investor asing untuk menanamkan modalnya di daerah.
 - ii. Memberi kemudahan para investor lokal maupun asing untuk menanamkan modalnya di daerah dengan menghilangkan birokrasi yang berbelit-belit.
2. Terhadap tingginya Kebutuhan Fiskal daerah perlu dilakukan manajemen pengeluaran daerah secara komprehensif yaitu dengan membuat Standar Analisa Biaya (SAB) yang berguna untuk memperkirakan jumlah pengeluaran/ alokasi dana setiap unit kerja Pemerintah Daerah, program kerja, dan unit kegiatan Pemerintah

Daerah untuk menghasilkan tingkat pelayanan publik tertentu sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian Pemerintah Daerah dapat meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran.



DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo, *Manajemen Penerimaan Daerah dan Struktur Daerah Dalam Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Andi Offset, 2001.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Andi Offset, 2002.
- Mardiasmo, *Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah (Prosiding Seminar Nasional)*, Yogyakarta, 2003.
- Halim, Abdul, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- Halim, Abdul, *Manajemen Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2004.
- Halim, Abdul, *Reformasi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*, 2001.
- Baswir, Revrisond, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, Edisi 3, BPFE, Yogyakarta, 1999.
- Mahi, Raksaka, *Prospek Desentralisasi di Indonesia Ditinjau Dari Segi Pemerataan Antar Daerah dan Peningkatan Efisiensi*, CSIS, Jakarta, 2000.
- Kuncoro, Mudrajad, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004.
- Yuliati, "Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Menghadapi Otonomi Daerah Kabupaten Malang", Dalam *Manajemen Keuangan Daerah*, Abdul Halim: UPP AMP YKPN Yogyakarta, 2004.
- Darmanto, "Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal", *Media Akuntansi*, (Maret-April 2003) hal 3-14.
- Simanjuntak, Thamrin, Drs., *Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah*, Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2004.
- Suadi, Arief, *Format Skripsi Berbasis Komputer*, BPFE, Yogyakarta, 2000.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999: *Tentang Pemerintahan Daerah*.

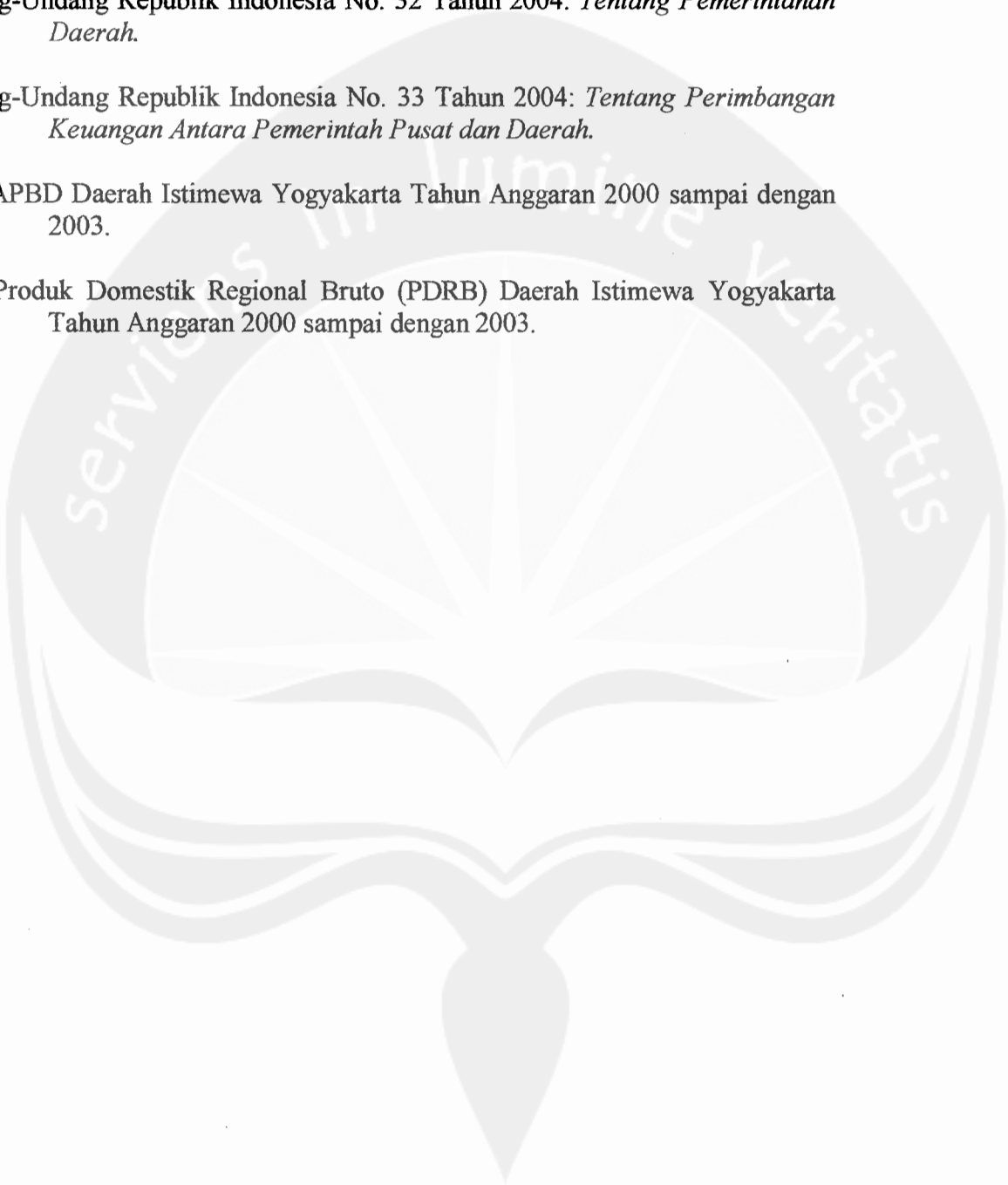
Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1999: *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004: *Tentang Pemerintahan Daerah.*

Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004: *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*

BPS, APBD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2000 sampai dengan 2003.

BPS, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2000 sampai dengan 2003.





BPS *Badan Pusat Statistik* *Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*

SURAT KETERANGAN

Nomor : 34560.014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Eli Sundari
NIP : 340014141
Jabatan : Kepala Seksi Diseminasi & Layanan Statistik.

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FERASARI CHRISTINA M.D
Nomor Mahasiswa : 000412168
Fakultas/Jurusan : EKONOMI _AKUNTANSI
Akademi/Universitas : ATMA JAYA YOGYAKARTA

Benar-benar telah mencari data di Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi D.I.Yogyakarta,
untuk keperluan penyusunan SKRIPSI dengan judul :

“ ANALISIS TINGKAT KEMANDIRIAN PEMERINTAH KABUPATEN DI PROPINSI
D.I. YOGYAKARTA DALAM MENGHADAPI OTONOMI DAERAH “

Demikian surat keterangan ini kami buat, dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Februari 2005

BADAN PUSAT STATISTIK
PROPINSI D.I.YOGYAKARTA
KASIE DLS,

